

Efektifitas Implementasi Pemerintah Surabaya Melaksanakan Kerjasama Sister City dengan Busan (2007-2012)

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

Rizky Pradipta Sauwir
NPM. 0944010007

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
PEMINATAN/KONSENTRASI HUBUNGAN INTERNASIONAL
SURABAYA
2013**

“jadilah Anak yang baik”

Adalah kalimat yang selalu mengawali pagi ku

“menjadi orang yang baik”

Adalah kalimat yang selalu mengawali mimpi ku

Terima kasih Ayah dan Bunda.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Pradipta Sauwir
NPM : 0944010007
Program Studi : Hubungan Internasional
Tahun Akademik : 2013/2014

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan skripsi saya yang berjudul :

**“EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH
SURABAYA MELAKSANAKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN
BUSAN (2007-2012) DI BIDANG PENDIDIKAN”**

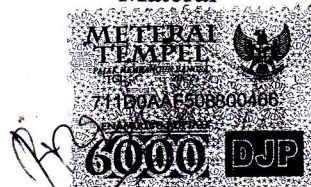
Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan plagiat maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 30 September 2013

Yang menyatakan

Materai



(Rizky Pradipta Sauwir)

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH SURABAYA
DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN BUSAN (2007-2012)
DI BIDANG PENDIDIKAN**

Disusun Oleh :

RIZKY PRADIPTA SAUWIR

NPM : 0944010007

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Dr. Jojok D., S.Sos., M.Si

NPT. 370119500421

Mengetahui

DEKAN

Dra. Hj. Suparwati, M.Si

NIP. 195507181983022001

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH SURABAYA
MELAKSANAKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN BUSAN (2007-2012)
DI BIDANG PENDIDIKAN**

Disusun Oleh :

RIZKY PRADIPTA SAUWIR

NPM : 0944010007

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan
Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 30 September 2013

Pembimbing Utama

Tim Penguji :

1. Ketua

Dr. Jojok D. S.Sos., M.Si
NPT. 370119500421

Dr. Jojok D. S.Sos., M.Si
NPT. 370119500421

2. Sekretaris

Juwito, S.Sos., M.Si
NPT. 367049500361

3. Anggota

Drs. Saifuddin Zuhri, M.Si
NPT. 370069400351

**Mengetahui
DEKAN**

Dra. Hj. Suparwati, M.Si
NIP. 195507181983022001

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH SURABAYA
MELAKSANAKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN BUSAN (2007-2012)
DI BIDANG PENDIDIKAN**

Disusun Oleh:

RIZKY PRADIPTA SAUWIR
NPM. 0944010007

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing

Dr. JOJOK D, S.Sos, MSi
NPT. 370119500421

Mengetahui

D E K A N

Dra. Hj. SUPARWATI, MSi
NIP. 195507181983022001

**EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH SURABAYA
MELAKSANAKAN KERJASAMA SISTER CITY DENGAN BUSAN (2007-2012)
DI BIDANG PENDIDIKAN**

Disusun Oleh :

RIZKY PRADIPTA SAUWIR
NPM. 0944010007

**Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ilmu Komunikasi Peminatan/Konsentrasi Hubungan Internasional
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 30 September 2013**

Pembimbing

Dr. JOJOK D, S.Sos, M.Si
NPT. 370119500421

Tim Penguji :

1. Ketua

Dr. JOJOK D, S.Sos, M.Si
NPT. 370119500421

2. Sekretaris

JUWITO S.SOS, M.Si.
NPT. 367049500361

3. Anggota

DRS. SAIFUDDIN ZUHRI M.Si
NPT. 370069400351

**Mengetahui,
D E K A N**

Dra. Hj. SUPARWATI, MSi
NIP. 195507181983022001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Surabaya Melaksanakan Kerjasama *Sister City* dengan Busan (2007-2012) di Bidang Pendidikan”**.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing pendamping Megahnanda A.K, S.IP, M.IP dan dosen pembimbing utama Dr. Jojok D. S.SOS, M.Si yang dengan segala perhatian dan kesabarannya rela meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini juga nasihat serta doanya. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Dra. Hj. Suparwati, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Juwito, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Saifuddin Zuhri, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Dr. Jojok D. S.Sos, M.Si selaku Kepala Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Dosen-dosen Program Studi Hubungan Internasional Bu Sarah, Pak Tom, Bu Indi, Pak Aswin, Pak Radit, Bu Tina, Bu Reza dan dosen-dosen HI lainnya, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan selama perkuliahan dukungan serta doanya. Tanpa kalian Saya bukan apa-apa.
7. Ayah Tjong Wahid Sauwir dan ibunda Yayuk Sugiarti tercinta yang selalu mendoakan dengan kasih sayang yang tiada batasnya, perhatian, dukungan dan selalu memberikan dorongan moriil dan materiil. Terima kasih untuk selalu mengingatkan menjadi yang terbaik untuk keluarga dan masa depan.
8. Kakak-kakak, terutama kakak tertua Bagus Dewantoro Sauwir atas segala dukungan mental dan semangatnya dalam membantu Saya selama proses dan masa-masa sulit yang sedang Saya hadapi ketika menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kakak kedua Ayu Gita Puspita Sauwir yang selalu menjadi inspirasi Saya dan kakak ketiga laki-laki Bayu Wicaksono Sauwir yang selalu bersabar dan menjaga Saya selama duduk dibangku kuliah ini. Terima kasih juga untuk adik yang selalu menjadi motivasi Saya untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik dan terbaik agar kelak dapat membimbing dan menjaganya. Juga kepada kakak ipar pertama Nimas Ayu Apriliani yang selalu bersedia menjadi teman sekaligus kakak perempuan kedua untuk mendengarkan semua celotehan Saya.
9. Tidak lupa sahabat-sahabat terbaik yang selalu memberi semangat dan dukungan meskipun kita berada dalam kondisi yang sama, diantaranya Dinda Y. Setyowati, Anne

Aprilia, dan Aulya Amalta R. untuk Onna teman sekamarku yang sudah sabar setiap harinya dengerin omelan-omelan menyebalkan Saya dikala sumpek selama penulisan skripsi ini, juga kepada mereka yang pernah menjadi teman bahkan saudara bagi Saya yang dengan tidak sengaja telah menjadi motivasi kepada Saya untuk terus semangat demi masa depan diantaranya Lulu, Kyda, Maetu, Nopi, dan Gkozt, terima kasih.

10. Terakhir, terima kasih banyak untuk yang terkasih Muhammad Rizki Febrian, yang memberikan banyak sekali pembelajaran, pengalaman, pengetahuan yang diberikan, membimbing dan mendampingi Saya, yang selalu menjadi akhir dari semua tujuan Saya, Amin.

Tanpa dukungan dan semangat dari yang telah disebutkan di atas Saya bukan apa-apa dalam penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Segala saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan skripsi ini.

Surabaya, 30 September 2013

Rizky Pradipta Sauwir

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI..	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kerangka Pemikiran	8
1.5.1 Peringkat Analisis	8
1.5.2 Landasan Teoritik	10
1.5.2.1 Konsep Desentralisasi....	10
1.5.2.2 Teori Kerjasama Antar Daerah Antar Negara	
(Konsep Sister City)	11
1.5 Argumentasi	14
1.6 Metodologi Penelitian	15

1.6.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional ..	15
1.6.1.1 Sister City ..	15
1.6.1.2 Memorandum Of Understanding (MOU) ..	16
1.6.1.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah ..	18
1.6.1.4 Kerjasama Pendidikan ..	19
1.6.2 Tipe Penelitian ..	20
1.6.3 Jangkauan Penelitian ..	20
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data ..	21
1.6.5 Teknik Analisis Data ..	22
1.6.6 Sistematika Penulisan ..	23
BAB II GAMBARAN UMUM KAJIAN PENELITIAN ..	25
2.1 Desentralisasi Sister City Surabaya-Busan ..	27
2.2 Memorandum Of Understanding Surabaya-Busan ..	29
2.3 Rincian Isi Perjanjian MOU Surabaya-Busan ..	32
BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA ..	37
3.1 Data Hasil Kerjasama Sister City Surabaya-Busan di Bidang Pendidikan Tahun 2010-2012 ..	37
3.2 Analisis Data ..	40
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
4.1 Kesimpulan ..	48
4.2 Saran ..	52
DAFTAR PUSTAKA ..	54

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran.....	12
--	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1 Data Hasil Kerjasama Sister City Surabaya-Busan	37
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabel Isi MOU

Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Staf Bagian Kerjasama Sister City

Surabaya-Busan di Sekretariat Jenderal Pemerintah Kota Surabaya

Lampiran 3 Kerangka Acuan Kerja Seleksi Delegasi Pendidikan Ke Luar Negeri

Lampiran 4 Laporan Perjalanan Dinas Delegasi Pendidikan Kota Surabaya

Tahun 2012 Ke Kota Busan

ABSTRAK

Nama : Rizky Pradipta Sauwir
NPM : 0944010007
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul :

“EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH SURABAYA MELAKSANAKAN KERJASAMA SISTER CITY SURABAYA DENGAN BUSAN (2007-2012) DI BIDANG PENDIDIKAN”

Otonomi daerah dan desentralisasi adalah pemberian sebagian kewenangan dan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Ini membuka kesempatan suatu Negara tersebut untuk melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan kota. Maka kota Surabaya (Indonesia) dan kota Busan (Korea Selatan) memutuskan untuk melaksanakan kerjasama *sister city* berdasarkan kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MOU). Selama proses pelaksanaan kerjasama *sister city* Surabaya – Busan dibutuhkan beberapa instrumen pendukung demi tercapainya tujuan yang tercantum didalam MOU. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif yang dijabarkan melalui tipe penelitian deskriptif terkait efektifitas hasil pencapaian kebijakan pemerintah Surabaya dalam melaksanakan kerjasama *sister city* dengan Busan di pendidikan.

Kata Kunci : desentralisasi, sister city, MOU

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ide awal *sister city* dilontarkan pertama kali pada tahun 1956 oleh Dwight David Eisenhower, Presiden Amerika Serikat ke 34. Awal mulanya penerapan konsep ini adalah sebagai sarana diplomasi politik negara di tingkat regional dan internasional bagi terciptanya saling kesepahaman dan persahabatan antar kota, antar negara dan antar benua bagi terwujudnya perdamaian antar kawasan, dan sebagai pilar terwujudnya perdamaian dunia. Pengimplementasiannya dapat menjadi pendorong bagi rakyat untuk dapat saling menjalin persahabatan dan kerjasama yang konstruktif, baik antar elemen masyarakat, antar kota, antar pemerintahan daerah dan pusat maupun antar negara di seluruh dunia.¹ Wilbur Zelinsky adalah seorang ahli geografi budaya Amerika yang mempelajari pesatnya perkembangan "fenomena *sister city*", ia mencatat bahwa "kota kembar" pertama kali ditemukan sebagai sebuah fenomena yang teroganisanisir di Eropa Barat setelah Perang Dunia II yang menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya yang sebagian besar adalah negara-negara dunia ketiga di tahun 1980.² *Sister city* dalam prakteknya ditahun-tahun awal adalah alat yang berguna untuk membawa warga Eropa ke dalam pemahaman lebih dekat satu sama lain untuk mendorong proyek-proyek lintas perbatasan yang saling

¹ Perdana, Yosanta Putri. 2008. Faktor-faktor Penghambat Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Melaksanakan Kerjasama Sister City dengan Seattle (1992-2007) diakses melalui Airlangga University Library pada 20 Juni 2010

² Wilbur Zelinsky, "The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historic Perspective," *Annals of the Association of American Geographers*, 81, no. 1 (1991): 1-31 dalam Asuka Ogawa "Sister City As Preservation Strategy" tahun 2012.

menguntungkan. Seperti pada tahun 1959, Coventry-Inggris Raya bekerjasama dengan Dresden-Jerman sebagai tindakan perdamaian dan rekonsiliasi, karena kedua kota telah dibom selama perang.³

Terdapat beberapa faktor yang memotivasi sebuah kota untuk mencari mitra kerjasama luar negeri menurut Clarke dan penelitian menunjukkan bahwa kerjasama *sister city* terjadi antara pemukiman dengan hubungan sejarah yang ingin dipertahankan atau dengan keprihatinan kontemporer bersama, masalah budaya, atau ideologi ekonomi.⁴ Tidak berbeda jauh dengan Zelinsky, yang dalam bukunya mengatakan bahwa pilihan negara dan masyarakat tertentu dalam program *sister city* bukanlah proses acak, melainkan berdasarkan sejarah kota, keprihatinan bersama, nama tempat yang mirip atau identik, semua memainkan peran yang berarti.⁵ Seperti yang terjadi pada kota Surabaya (Indonesia) dan kota Busan (Korea Selatan) dalam memutuskan untuk melaksanakan kerjasama *sister city*. Kerjasama tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa alasan yang kuat.

O'toole mengidentifikasi 3 langkah dalam pembangunan daerah yang memotivasi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama *Sister City* diantaranya tindakan asosiatif, resiprokatif dan pendekatan komersial.⁶ Menurut O'toole tindakan asosiatif ini mengarah kepada ketergabungan dengan persahabatan internasional, pertukaran budaya, dan adanya kesadaran akan komunitas internasional. Sedangkan

³ The Council of European Municipalities and Regions, *Twinning for Tomorrow's World: A Practical Handbook* (Brussels: The Council of European Municipalities and Regions, 2007), h. 2 -5, dalam *ibid*.

⁴ Clarke, "Globalising care? Town twinning in Britain since 1945," 115-116, dalam *ibid*.

⁵ Zelinsky, "The Twinning of the World: Sister Cities in Geographic and Historic Perspective," h.1, dalam *ibid*.

⁶ O'Toole, K., 'Kokusaika and Internationalisation: Australian and Japanese *Sister City* Type Relationships', 2001, dikutip oleh Brian Cross, h.108 dalam Jurnal Septa Novasari Ginting. *Ekonomi Politik Kerjasama Sister City Kabupaten Karo (Indonesia) Dan Kota Zundert (Belanda) Tahun 2007-2012*. Dalam [online] repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/2817/1/jurnal%20oke.pdf di akses pada tanggal 8 July 2013

resiprokatif mengacu kepada tindakan daerah untuk meningkatkan pertukaran sistem edukasi. Sehingga ketika proses asosiatif dan reprodktif ini berjalan dengan baik maka peluang untuk tujuan ekonomi akan lebih besar terbuka untuk daerah yang melakukan kerjasama.⁷ Sejarawan Joseph G. Hummel dalam artikelnya tahun 1970, “*The Sister City and Citizen Diplomacy*,” mencatat bahwa keefektifan *sister city* afiliasi tergantung pada ketelitian dalam menganalisa profil budaya, kondisi geografis dan perdagangannya serta karakteristik sosial kota yang memiliki kesamaan sehingga menemukan kota yang cocok dan komunitas yang saling tertarik sehingga kemitraan ini akan terus berlangsung.⁸

Sister City sering juga disebut *Twining City* atau dalam bahasa Indonesia kota kembar, adalah kerjasama antar kota bersifat luas, yang disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.⁹ Di Indonesia istilah ini digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, dengan keluarnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam dan luar negeri.¹⁰

Kerjasama *sister city* antara kota Surabaya dengan kota Busan dilaksanakan berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MOU) yang telah ditandatangani pada

⁷ *Ibid.*

⁸ Hummel, “The Sister City and Citizen Diplomacy,” h.25-26, dalam Asuka Ogawa “Sister City As Preservation Strategy” tahun 2012.

⁹ Council of European Municipalities and Regions. 2007. *Twinning For Tomorrow’s World: Practical Handbook*. Paris, CCRE & Brussels, CEMR dalam dan luar negeri dalam Andi Oetomo “Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City” dalam [online] bulletin.penataanruang.net/upload/data.../edisi3i.pdf di akses pada tanggal 8 July 2013.

¹⁰ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 193/1652/PUOD tanggal 26 April 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (*Sister City*) dan Antar Provinsi (*Sister Province*) dalam *ibid.*

tanggal 10 Nopember 1994 (di Surabaya) dan tanggal 20 November 2004 (di Busan). Bagi Pemerintah Kota Surabaya, jalinan kerjasama dengan kota-kota lain di dalam negeri maupun di luar negeri dimaksudkan antara lain untuk : 1. Menghadapi globalisasi dan pasar bebas, 2. Membantu dalam usaha pembangunan dan pengembangan daerah, 3. Mendapatkan kesempatan untuk mempromosikan daerah dalam dunia internasional.¹¹

Kerjasama *sister city* mulai dilaksanakan 5 tahun setelah penandatanganan MOU pada tahun 1994 antara Walikota Surabaya (waktu itu) H.Sunarto Sumoprawiro dengan walikota Busan di Korea Selatan. Namun pelaksanaan kerjasamanya aktif pada tahun 2006. Bidang kerjasama yang disepakati diantaranya Pengembangan Pelabuhan; Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi; Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Kota; Transportasi dan Pariwisata; Peningkatan Sumber Daya.¹² Akan tetapi dari beberapa bidang tersebut hanya bidang pendidikan yang paling menonjol dan aktif dalam pelaksanaannya, terhitung sejak tahun 2007 hingga tahun 2012..

Kerjasama *sister city* ini dilaksanakan Surabaya dan Busan karena memiliki sebuah alasan yang kuat yakni memiliki banyak kesamaan. Diantaranya kesamaan kedudukan dan status kesamaan administrasi, yakni sebagai kota terbesar kedua di Negara-nya dan sama-sama dipimpin oleh walikota sehingga dalam kedudukannya

¹¹ Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya “*Sister City*” dalam online <http://www.surabaya.go.id/sistercity/> di akses pada tanggal 13 April 2013.

¹² Data Resmi Departemen Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri.

tidak ada yang lebih tinggi ataupun sebaliknya.¹³ Kesamaan karakteristik, menambah peluang keberhasilan kerjasama *sister city* antara Surabaya dengan Busan. Kedua kota ini sama-sama merupakan kota pelabuhan, kota metropolitan, kota budaya, kota industri dan perdagangan serta kota yang memiliki pariwisata yang menawan. Karakteristik kota yang sama inilah menjadikan Surabaya dan Busan lebih nyaman dengan adanya kesamaan-kesamaan tersebut hingga mendorong pada hubungan kerjasama yang lebih kondusif.¹⁴ Adanya kondisi saling melengkapi diantara Surabaya dengan Busan menjadikan setiap hal yang mereka jalani dapat berjalan dengan baik karena kedua kota ini bisa saling mengisi di tengah kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saling melengkapi dalam ekonomi dan perdagangan, mengadakan kunjungan pejabat, pertukaran pelajar, membangun taman persahabatan, investasi dan saling membantu untuk meningkatkan hubungan kedua kota beda Negara tersebut lebih harmonis dalam melakukan kerjasama antar kota atau *sister city*.¹⁵ Dengan beberapa kesamaan yang ditemukan antara kota Surabaya dengan kota Busan, membuka peluang untuk saling bertukar informasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kota masing-masing dengan saling melengkapi melalui pertukaran pelajar dan tim pengajar.

¹³ Situs Resmi Pemerintah Kota Surabaya "*Sister City*" . *Op. cit.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan pengamatan penulis tersebut muncul pertanyaan **bagaimana efektifitas implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya melaksanakan kerjasama *sister city* dengan Busan (2007-2012) dalam bidang pendidikan?** Indikator penulis dalam membuktikan keefektifan tersebut adalah berdasarkan pencapaian tujuan pelaksanaan *sister city* Surabaya-Busan melalui implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis memilih judul **“Efektifitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Melaksanakan Kerjasama *Sister City* dengan Busan (2007-2012) di bidang Pendidikan”** adalah agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Diantaranya :

- 1) Diharapkan dapat mendukung bukti empiris yang berguna terhadap pengembangan teori, khususnya dalam teori Kerjasama Antar Daerah Antar Negara.
- 2) Untuk mengetahui efektifitas pencapaian apakah yang telah didapat dari tujuan dilaksanakannya kerjasama dua kota yang berbeda Negara ini berdasarkan implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya selama kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2012 dalam bidang pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan di tingkat daerah atau kota terkait implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam pelaksanaan kerjasama *sister city* Surabaya-Busan di ranah hubungan internasional. Dengan penemuan informasi dan data yang ditemukan penulis di lapangan, melalui penelitian ini dapat disumbangkan suatu penemuan baru tentang pengukuran efektifitas sebuah kebijakan pemerintah kota Surabaya melaksanakan kerjasama *sister city* Surabaya-Busan di bidang pendidikan dalam kesepakatan MOU.

Juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kerjasama *Sister City* Kota Surabaya dan Kota Busan terutama dalam bidang Pendidikan sebagai suatu Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam memajukan pembangunan kota Surabaya melalui penambahan wawasan dikalangan pelajar dan peningkatan mutu kualitas tim pendidik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu dan kajian bagi seluruh pihak terkait pelaksanaan kerjasama *sister city* Surabaya-Busan melalui desentralisasi dan teori kerjasama antar daerah antar negara. Diharapkan pula penelitian ini bisa menjadi landasan penelitian lain terkait implementasi kebijakan pemerintah kota Surabaya melaksanakan kerjasama *sister city* dengan daerah atau kota dari negara lain.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Peringkat Analisis / *Level of Analysis*

Konsep peringkat analisis (*level of analysis*) sebagai salah satu konsep dasar sudah lama dikenal dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional. Perdebatan mengenai peringkat analisis ini bermula di tahun 1960-an dan 1970-an,¹⁶ dan diawali oleh David J. Singer ketika tahun 1961 mengeluarkan karya klasiknya “*The Level of Analysis Problem in International Relations*”.¹⁷ Menurut David J. Singer level analisis merupakan sebuah fokus yang diambil dari dalam kasus dan permasalahan besar yang ada. Yakni penyortiran fenomena yang ada kedalam analisis pembahasan yang spesifik dalam penelitian ilmiah. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah analisis yang sistemik.¹⁸

“He may, for example, choose between the flowers or the garden, the rocks or the quarry, the trees or the forest, the houses or the neighborhood, the cars or the traffic jam, the delinquents or the gang, the legislators or the legislative, and so on.” Whether he selects the micro or macro-level of analysis is ostensibly a mere matter of methodological or conceptual convenience.”¹⁹

Hasil dari pemilihan ini yang kemudian menjadi fokus penelitian dan level analisis dari penelitian akan dapat ditentukan oleh penulis, penentuan level analisis akan mempermudah penulis dalam memetakan penggunaan perspektif dan teori umum yang besar dalam Hubungan Internasional. Level analisis merupakan hal yang penting

¹⁶ Michael P. Sullivan. *Power in Contemporary International Politics*. COLUMBIA: University of South Carolina. 1990. hal.7

¹⁷ David J. Singer. “The Level of Analysis Problem in International Relations” dalam *World Politics*. Vol.14.No. 1, 1961, hal. 77-92.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

dalam penelitian ilmiah sosial karena dengan memfokuskan analisis terhadap tingkatan tertentu penulis akan semakin mudah dalam menjelaskan permasalahan dan menyusun penelitian dengan lebih mendetail dengan prediksi penelitian yang lebih *reliable* dan dapat dipercaya.²⁰

Singer membagi konsep menjadi dua bagian diantaranya sistem internasional dan sistem sub-nasional.²¹ Dalam penelitian ini penulis memilih tingkat level analisis sub-nasional menurut David J. Singer yang dalam analisis politik luar negeri ini terdapat asumsi bahwa untuk mencapai tujuan dalam interaksi hubungan internasional maka diperlukan atribut nasional berupa sikap negara dalam membuat keputusan.²² Sikap negara dalam membuat keputusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap pemerintah daerah dalam memutuskan melaksanakan kerjasama *sister city* dengan Busan. Mengapa pemerintah daerah, karena dalam penelitian ini pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah pusat dalam menangani segala urusan dan pengembangan kota Surabaya melalui desentralisasi. Sama dengan penerapan system desentralisasi di kota Surabaya, kota Busan juga mengalami hal yang sama sehingga level analisis yang tepat untuk digunakan adalah level analisis sub-nasional. Melalui sistem desentralisasi pemerintah daerah dalam hal ini diwakili oleh walikota masing-masing kota membuat keputusan

²⁰ David J. Singer. "The Level of Analysis Problem in International Relations" dalam *World Politics*. Vol.14.No. 1, 1961, hal. 77-92 dalam Kinanti, Fellin. 2013. Metode Analisis Hubungan Internasional-Level Analisis dalam [online] http://fellinkinanti-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-70904-Metode%20Analisis%20Hubungan%20Internasional-Level%20Analisis.html di akses pada tanggal 4 Oktober 2013.

²¹ David J. Singer. "The Level of Analysis Problem in International Relations" dalam *World Politics*. Vol.14.No. 1, 1961, hal. 77-92.

²² *Ibid.*

untuk melaksanakan kerjasama *sister city* dan membuat kesepakatan berdasarkan kesepakatan MOU.

1.5.2 Landasan Teoritik

1.5.2.1 Konsep Desentralisasi

Secara umum definisi dan ruang lingkup **desentralisasi** menurut pendapat Rondinelli dan Bank Dunia adalah transfer kewenangan dan tanggung jawab fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi-pemerintah, maupun kepada swasta.²³ Sebagai pembanding, baik juga mengacu pendapat Turner dan Hulme yang berpendapat bahwa desentralisasi di dalam sebuah negara mencakup pelimpahan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, dari pejabat atau lembaga pemerintahan di tingkat pusat kepada pejabat atau lembaga pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat yang harus dilayani.²⁴

Sama yang terjadi pada pemerintahan daerah kota Surabaya dan pemerintahan daerah kota Busan. Kedua pemerintahan daerah kota tersebut telah mendapat pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh

²³ The World Bank, Independent Evaluation Group. Decentralization in Client Countries– An Evaluation of World Bank Support, 1999-2007, 2008. Rondinelli, Dennis, 1999, “*What is Decentralization?*”, in World Bank, *Decentralization Briefing Notes*, WBI Working Papers.

²⁴ Turner, Mark and David Hulme, 1997, *Governance, Administration and Development: Making the State Work*, London: Macmillan Press Ltd dalam Osward Mungkasa. “Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia : Konsep, Pencapaian dan Agenda Ke Depan” dalam [online] http://www.academia.edu/2759012/Desentralisasi_dan_Otonomi_Daerah_di_Indonesia_Konsep_Pencapaian_dan_Agenda_Kedepan di akses pada tanggal 12 April 2013.

pemerintah pusat.²⁵ Pada era reformasi dikeluarkan Undang-Undang mengenai desentralisasi dan otonomi daerah, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan yang kemudian direvisi masing-masing menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Terdapat 3 (tiga) tujuan desentralisasi, yaitu (i) tujuan politik, untuk menciptakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang demokratik berbasis pada kedaulatan rakyat. Diwujudkan dalam bentuk pemilihan kepala daerah, dan legislatif secara langsung oleh rakyat; (ii) tujuan administrasi, agar pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dan bermitra dengan DPRD dapat menjalankan fungsinya untuk memaksimalkan nilai 4E yakni efektifitas, efisiensi, *equity* (kesetaraan), dan ekonomi; (iii) tujuan sosial ekonomi, mewujudkan pendayagunaan modal sosial, modal intelektual dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara luas.²⁶

1.5.2.2 Teori Kerjasama Antar Daerah Antar Negara

Kesempatan pengembangan pembangunan kota Surabaya dengan menjalin kerjasama dengan kota di negara lain menjadi luas, terlebih dengan yang memiliki unsur kesamaan. Seperti halnya menjalin kerjasama dalam *sister city* dengan kota Busan. **Kerjasama antar daerah antar negara** adalah suatu kerangka hubungan

²⁵ Oswar Mungkasa "Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia: Konsep, Pencapaian dan Agenda Kedepan" dalam online
http://www.academia.edu/2759012/Desentralisasi_dan_Otonomi_Daerah_di_Indonesia_Konsep_Pencapaian_dan_Agenda_Kedepan di akses pada tanggal 21 Mei 2013

²⁶ *Ibid.*

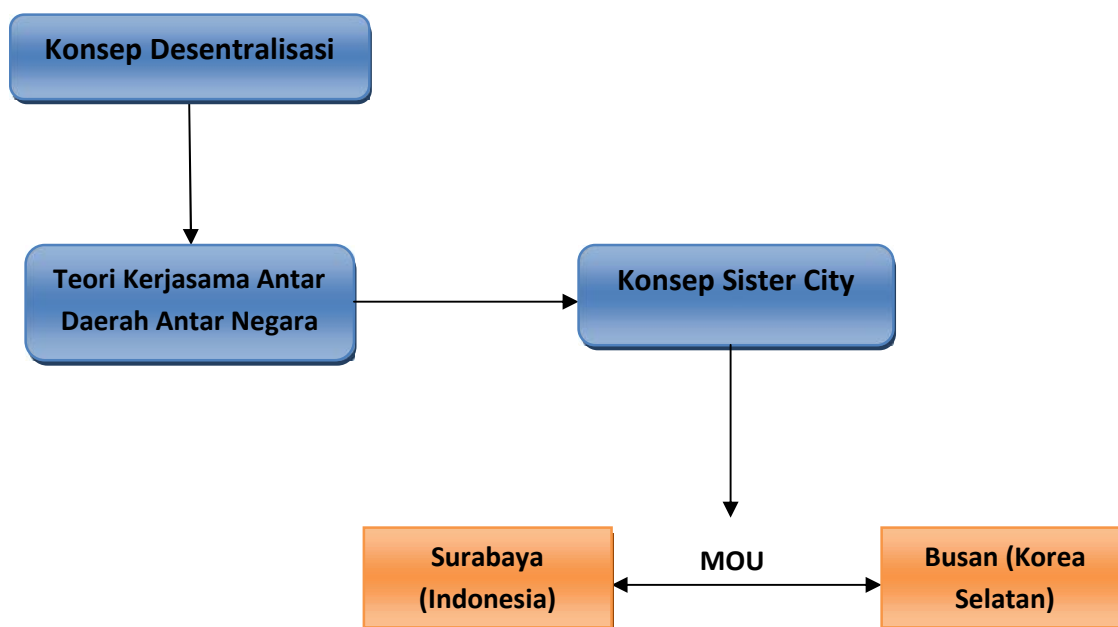
kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih dari negara yang berbeda, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.²⁷ Sedangkan Patterson mendefinisikan kerjasama antar daerah antar negara (*intergovernmental cooperation*) sebagai "*an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem*" menurut definisi tersebut kerjasama antar daerah antar negara juga dapat diartikan sebagai sebuah kesepakatan antar dua atau lebih pemerintah daerah dari negara yang berbeda dalam rangka merealisasikan tujuan bersama, menyediakan layanan atau menyelesaikan persoalan yang sama.²⁸ Terdapat dua motivasi utama kerjasama antar daerah ini menjadi penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya eksternalitas, yakni kemungkinan terjadinya perkembangan pesat suatu kota yang pada akhirnya berdampak negatif pada kota lain. Yang kedua adalah, disadarkan pada kesadaran akan kekurangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga menjalin kerjasama antar daerah akan membawa keuntungan jika saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi secara bersama sehingga dapat saling menutupi kekurangan kota masing-masing. Ini yang terjadi pada kota Surabaya dan Busan dimana dalam bidang pendidikan yang

²⁷ Pamudji, 1985, *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*, PT. Bina Aksara, Jakarta dalam Tesis Wahyudi. *Kajian Kerjasama Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng* dalam [online] eprints.undip.ac.id/23708/1/WAHYUDI.pdf di akses pada tanggal 21 Mei 2013.

²⁸ Patterson, D.A. 2008. *Intergovernmental Cooperation*. Albany, NY: New York State Department of State Division of Local Government Services. Warsono, H. 2009. *Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah (Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah)*. Ringkasan Disertasi, UGM.

kedua kota ini saling bertukar untuk saling mengembangkan potensi yang ada pada kota masing-masing.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep desentralisasi yang memberikan peluang dan kesempatan kepada pemerintah daerah/kota untuk melakukan dan melaksanakan pengembangan pembangunan kota dengan melakukan kerjasama antar daerah antar negara dengan berdasarkan pada teori kerjasama antar daerah antar negara. Kemudian muncul sebagai konsep *sister city* antar Surabaya dan Busan yang bertujuan untuk saling melengkapi kekurangan dan mengembangkan potensi yang ada khususnya dalam bidang pendidikan dalam suatu kesepakatan yang disebut *Memorandum of Understanding* dan ditandatangani oleh walikota Surabaya dan Busan.



1.1 Bagan Kerangka Pemikiran

²⁹ Ibid.

1.6 Argumentasi

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berupa analisis metode kualitatif. Meskipun analisisnya kualitatif tidak menutup kemungkinan penelitian ini menolak angka.³⁰ Menurut Prof. Dr. Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kombinasi”, penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif (yang merupakan paparan dari data angka dan statistik).³¹ Maka itu penulis menggunakan argumentasi karena mencoba menemukan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan pengumpulan data dan bukan mencari suatu hubungan antar variabel melalui hipotesis.

Salah satu pencapaian yang didapat dari hasil kerjasama *sister city* kota Surabaya dan Busan dalam bidang pendidikan adalah aktif melaksanakan program pertukaran siswa dan guru. Setiap tahun, beberapa siswa dan guru pendamping dari kota Surabaya melakukan program pertukaran siswa dan guru ke kota Busan. Hasil yang dicapai dalam program tersebut adalah peningkatan kualitas siswa dan guru tentang proses pembelajaran di Korea, penambahan wawasan tentang pendidikan beserta fasilitas-fasilitas yang dimilikinya dan budaya di Korea.

³⁰ Prof. Dr. Sugiyono. “Memahami Penelitian Kualitatif”, hal.3

³¹ Prof. Dr. Sugiyono. 2011. “Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)”. Bandung : Alfabeta CV. Hal :99-100.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

Definisi Konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau memberi makna suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptual merupakan penggambaran secara umum dan menyeluruh yang menyiratkan maksud dari konsep atau istilah tersebut, bersifat konstitutif (merupakan definisi yang disepakati oleh banyak pihak dan telah dibakukan di kamus bahasa), formal dan mempunyai pengertian yang abstrak.³²

Definisi operasional adalah serangkaian langkah-langkah prosedural dan sistematis yang menggambarkan kegiatan guna mendapatkan eksistensi empiris dari konsep.³³

1.7.1.1 *Sister City*

Definisi Konseptual *sister city* atau kota kembar adalah konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontrak sosial antar penduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena antara dua kota. Perlu dipahami bahwa kerjasama tersebut adalah kerjasama antar kota sehingga segala sesuatu yang

³² Mahfudanshori. "Pengertian Konsep Dan Variabel" dalam [online] www.scribd.com/doc/10712476/BAB-2-Konsep-Dan-Variabel diakses pada tanggal 10 Juni 2013.

³³ *Ibid.*

dapat dilakukan merujuk pada hak dan kewenangan setingkat kota.³⁴ Dengan demikian perlu adanya kejelasan apa yang harus dilakukan kedua belah pihak ketika nantinya muncul kendala atau permasalahan yang harus diselesaikan di luar kewenangan kedua belah pihak/kota tersebut.

Secara operasional *sister city* adalah kerjasama antar daerah antar negara yang disepakati oleh kota Surabaya (Indonesia) dan kota Busan (Korea Selatan) berdasarkan sebuah kesepakatan yakni MOU dengan alasan memiliki beberapa kesamaan dan kebutuhan yang dapat saling melengkapi dalam bidang pendidikan.

1.7.1.2 Memorandum Of Understanding (MOU)

Dalam perjanjian internasional terdapat banyak sekali istilah yang digunakan, akan tetapi penulis lebih mengkhususkan pada istilah Memorandum Saling Pengertian atau *Memorandum of Understanding* (MOU). MOU adalah sebuah perjanjian yang berisi pernyataan persetujuan tidak langsung atas perjanjian lainnya atau pengikatan kontrak yang sah atas suatu materi yang bersifat informal atau persyaratan yang longgar, kecuali pernyataan tersebut disertai atau merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan pemikiran dari para pihak yang dikehendaki oleh keduanya untuk mengikat.³⁵ MOU merupakan salah satu model dokumen yang memiliki sifat khas/*typical*, terdapat pada praktek negara khususnya negara-negara *common law*

³⁴ Sister Cities International. 2004. What are Sister Cities?. Washington DC dalam Andi Oetomo "Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City" dalam [online] bulletin.penataanruang.net/upload/data.../edisi3i.pdf di akses pada tanggal 8 July 2013.

³⁵ Dr. Shalahuddin Amer, Muqoddimah Ii Dirosat al Qonun al Dauli, Dae Al Nadha, Cairo, hal.181 dalam Sumber-sumber Formil Hukum Internasional pada Makalah yang disampaikan pada Kajian Reguler Forum Syari'ah wal Qonun (FSQ), 23 Maret 2010. (Oleh : H. Akbar Hiban, Mantan Ketua Senat FSQ 2007-2008) dalam [online] <http://books.google.com/books?id=MtknJXaXwCgC> di akses pada tanggal 23 Mei 2013.

system seperti Inggris, Amerika, Malaysia, India, dan Australia yang berpandangan bahwa MOU adalah tidak mengikat secara hukum/*non-legally binding* dan perlu dibedakan dengan traktat/*treaties*.³⁶ Para ahli berpendapat bahwa istilah MOU digunakan dengan alasan politis yaitu ingin sedapat mungkin menghindari penggunaan persetujuan/*agreement* yang dinilai lebih formal dan mengikat. Persetujuan/*agreement* adalah perjanjian yang bersifat teknis dan administratif. Sifat *agreement* mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari traktat atau konvensi, sehingga bisa diratifikasi. Adanya pengertian MOU yang *non-legally binding* dalam praktek beberapa negara akan menimbulkan suatu situasi bahwa satu pihak menilai dokumen tersebut sebagai perjanjian internasional yang mengikat namun pihak yang lain menganggap dokumen itu hanya memuat komitmen politik dan moral lebih mengarah kepada perikatan/*arrangement*. Perikatan/*arrangement* adalah suatu perjanjian yang mengatur pelaksanaan teknik operasional suatu perjanjian induk. Dapat disimpulkan bahwa *arrangement* adalah instrumen turunan dari *Memorandum Of Understanding*/MOU dan MOU adalah instrumen turunan dari *agreement*.³⁷

Secara operasional *Memorandum of Understanding* ialah kesepakatan atas perjanjian antara kedua pihak kota beda negara yakni kota Surabaya dan kota Busan yang disepakati berdasarkan keinginan tercapainya tujuan kedua pihak yang saling menguntungkan.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Agusman, Damos Dumoli. Apa Perjanjian Internasional itu? Beberapa Perkembangan Teori dan Praktek di Indonesia Tentang Hukum Perjanjian Internasional (dalam “Refleksi Dinamika Hukum” (2008) dalam rangka mengenang Prof. Dr. Komar Kantaadmaja, S.H., LL.M) dalam (online) <http://e-library.kemlu.go.id/>, diakses pada tanggal 28 November 2012

1.7.1.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Secara konseptual pandangan Litvack & Seddon yang mengemukakan bahwa desentralisasi adalah “*transfer of authority and responsibility for public function from central to sub-ordinate or quasi-independent government organization or the private sector*“. Definisi desentralisasi dari Litvack dan Seddon, dipahami dalam konteks hubungan pemerintah yang mewakili negara dengan entitas lainnya meliputi organisasi pemerintah sub-nasional, organisasi pemerintah yang semi-bebas serta sektor swasta.³⁸

Secara operasional desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia (DPRD) dan pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah daerah dalam penelitian ini pemerintah kota Surabaya dan pemerintah kota Busan untuk melaksanakan kerjasama *sister city*.

Secara konseptual otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang dan kekuasaan : perencanaan, pengambilan keputusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (organisasi-organisasi pelaksana daerah, unit-unit pelaksana daerah) kepada organisasi semi-otonom dan semi otonom (parastatal) atau kepada organisasi non-pemerintah.³⁹

³⁸ Jennie Litvack, Junaidi Achmad, and Richard Bird, Rethinking Decentralization in Developing Countries, The World Bank Washington D.C, USA, 1999. hal 2 dalam Makalah Sadu Wasistiono. Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan.

³⁹ Cheema, G.S and Rondinelli. G.A (editors) : Decentralization and Development : Policy Implementation in Develoing Countries, Beverly Hills, Sage. 1983 dalam *ibid*.

Secara operasional otonomi daerah adalah proses pelimpahan kewenangan dan kekuasaan yang diberikan pemerintah pusat dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia (DPRD) dan pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah daerah dalam penelitian ini pemerintah kota Surabaya dan pemerintah kota Busan dalam mengurus kewajiban dalam melayani masyarakat dan mengembangkan teritorial kewenangannya secara baik dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat khususnya kerjasama *sister city*.

1.7.1.4 Kerjasama Pendidikan

Secara konseptual kerjasama pendidikan merupakan kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat⁴⁰ dalam proses pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.⁴¹

Secara operasional kerjasama pendidikan adalah suatu pelaksanaan saling melengkapi yang dilakukan oleh dua pihak yakni kota Surabaya dan kota Busan berdasarkan kesepakatan yang dibuat bersama untuk mencapai suatu tujuan dalam

⁴⁰ Pamudji, 1985, Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara, PT. Bina Aksara, Jakarta dalam Tesis Wahyudi. Kajian Kerjasama Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng dalam [online] eprints.undip.ac.id/23708/1/WAHYUDI.pdf di akses pada tanggal 21 Mei 2013.

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka dalam [online] <http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-pendidikan-menurut-para-ahli.html> di akses pada tanggal 2 July 2013.

bidang pendidikan yang meliputi pertukaran pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi (Universitas), serta pertukaran tim pengajar, guru dan dosen.

1.7.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif yang menurut Mas'ood adalah upaya untuk menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana”. Sedangkan tipe penelitian eksplanasi berusaha untuk menjawab pertanyaan “mengapa”.⁴² Sementara tipe penelitian prediktif adalah untuk menjawab pertanyaan “apa yang terjadi”.⁴³ Berdasarkan pandangan Mas'ood, tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena menjawab pertanyaan “bagaimana”. Dalam penelitian deskriptif ini penulis mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.⁴⁴

1.7.3 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak lima tahun setelah penandatanganan MOU pada tanggal 10 November tahun 1994 oleh walikota Surabaya dan walikota Busan yang berarti dimulai sejak tahun 2006. Akan tetapi karena yang menjadi fokus penulis adalah bidang pendidikan maka kurun waktu yang terhitung adalah sejak tahun 2007

⁴² Mohtar Mas'ood. Ilmu Hubungan Internasional. “Disiplin dan Metodologi. hal.262.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hal. 261.

hingga tahun 2012. Karena pelaksanaan kerjasama *sister city* Surabaya-Busan mulai aktif dilaksanakan pada tahun 2007. Penulis memilih memfokuskan penelitian di bidang pendidikan karena bidang tersebut lebih menonjol dalam pelaksanaannya dan rutin dilaksanakan setiap tahun.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi langsung melalui obyeknya,⁴⁵ tekniknya dilakukan melalui cara wawancara atau pengamatan. Dan yang diperoleh peneliti adalah melalui cara wawancara dengan Ibu Rismasari selaku Staf Bagian Kerjasama Sister City Surabaya-Busan untuk mendapatkan informasi mengenai sejauh mana kerjasama *sister city* Surabaya-Busan. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Pengertian lain bahwa data sekunder merupakan data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder biasanya digunakan oleh peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap ataupun untuk diproses lebih lanjut⁴⁶ teknik

⁴⁵ J. Supranto, hal 120, 1997 dalam pdf Bab III Metodologi Penelitian oleh B Ardimas - 2007 dalam [online] eprints.undip.ac.id/34667/6/1734_CHAPTER_III.pdf di akses pada tanggal 28 Juni 2013

⁴⁶ Sugiarto, et.al., 2001 dalam pdf Kajian Kerjasama Daerah Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng oleh Wahyudi dalam [online] eprints.undip.ac.id/23708/1/WAHYUDI.pdf di akses pada tanggal 28 Juni 2013

yang digunakan untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan juga dokumentasi berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh langsung dari Pemkot Surabaya.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang tidak terungkap melalui data statistik, sehingga membutuhkan pendekatan melalui teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, dan teknik pengumpulan data sekunder berupa kepustakaan dan dari dokumen – dokumen resmi. Dalam penelitian ini penulis menghubungkan serangkaian data primer dan data sekunder yang telah diolah dan dianalisa untuk mencari pemahaman dan kebenaran berdasarkan rumusan masalah yakni pencapaian apa yang telah didapat dari kebijakan pemerintah melaksanakan kerjasama *sister city* Surabaya-Busan berdasarkan MOU selama kurun waktu tahun 2007 – 2012. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁴⁷

⁴⁷ Uber Silalahi (2006), Metodologi Penelitian Sosial, Bandung : Unpar Press, h.311

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah atau topik yang akan dibahas, tujuan penelitian, kerangka pemikiran yang didalamnya terkait dengan peringkat analisis dan landasan teoritik, serta dilengkapi juga dengan hipotesa dan metodologi penelitian.

Bab II : Kerjasama *sister city* kota Surabaya – Busan dalam bidang pendidikan sesuai MOU dalam kurun waktu 2007 – 2012.

Dalam bab ini, akan dijelaskan singkat secara umum latar belakang atau alasan kota Surabaya dan Busan melakukan kerjasama *sister city*. Kemudian akan dibahas bidang-bidang kerjasama yang disetujui kedua pihak didalam MOU beserta rincian pasal-pasal yang terdapat dalam kesepakatan MOU.

Bab III : Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama *sister city* dengan Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Bidang Pendidikan

Bab ini akan membahas hasil yang diperoleh dari kebijakan pemerintah kota Surabaya dalam melaksanakan kerjasama *sister city* dengan Busan di bidang pendidikan, dalam kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2012 yang berdasarkan kesepakatan dalam MOU. Data ini diperoleh berdasarkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi dan wawancara.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan termasuk analisa yang didapat dari Bab III. Bab ini akan lebih menjelaskan secara inti dan merupakan rangkuman dari hasil penulisan skripsi.